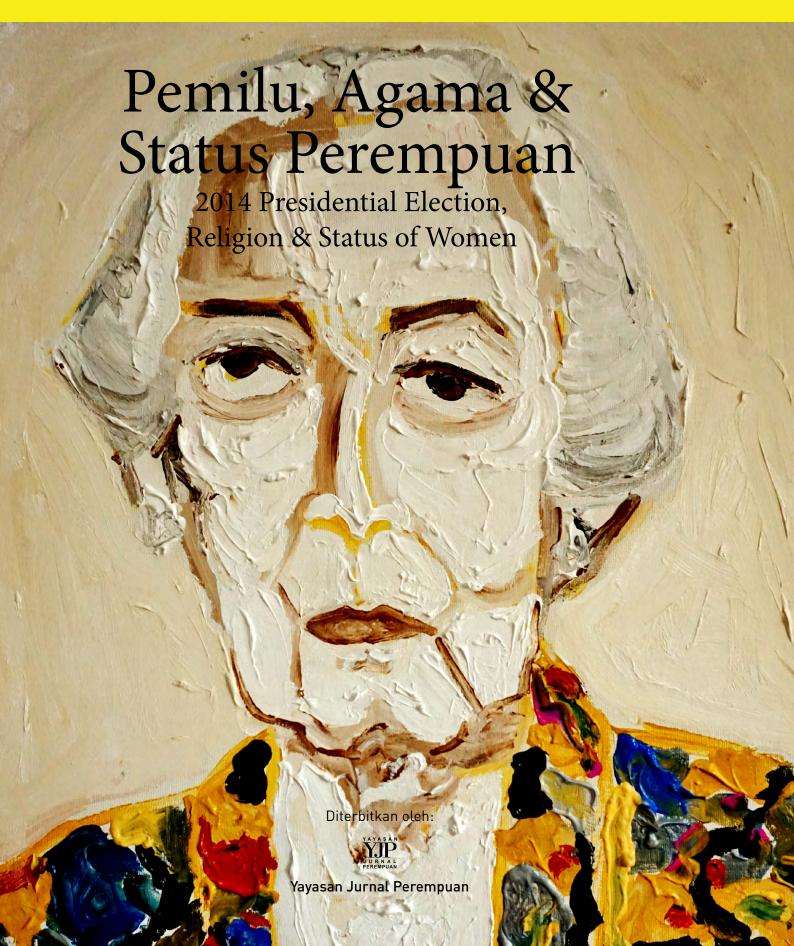
82

INDONESIAN FEMINIST JOURNAL



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

JURNAL PEREMPUAN

Mengapa Perempuan Disiksa? The Handmaid's Tale: Feminisation of Automated Work From Indonesia Workplaces



Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp.9200,- Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di

Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroplah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 sahabat Jurnal Perempuan. Gabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
SJP Company: Rp. 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan dan Jurnal Perempuan Muda secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai beriktut:

- BCA KCP Menteng a.n Gadis A. Effendi, No. Rekening: 7350454416
- Bank Mandiri cabang Tebet Raya a.n Yayasan Jurnal Perempuan, No. Rekening 124-00-0497988-7
(Mohon bukti transfer difaks ke 021 83706747, attn: Andri Wibowo/Gerry)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Mariana Amiruddin (Hp 08174914315, email: mariana@ jurnalperempuan.com) dan Deedee Achriani (Hp 0818730289, email: deedee@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada setiap tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.





ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno Ratna Syafrida Dhanny Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M. Mari Elka Pangestu, Ph.D. Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)

Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)

Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)

Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)

Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)

Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)

Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)

Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)

David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas
Airlangga)

Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)

Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)

Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)

Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)

Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)

Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga) Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia) Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)

Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah Andri Wibowo Hasan Ramadhan Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Agus Wiyono

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas, Setiabudi - Jakarta Selatan 12960 Telp. (021) 8370 2005 (hunting) Fax: (021) 8370 6747 Email: yjp@jurnalperempuan.com redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Agustus 2014





Pemilu, Agama & Status Perempuan 2014 Presidential Election, Religion & Status of Women

Daftar Isi

Catat	an Jurnal Perempuan: Status Perempuan dalam Politik	III-IV
Artik	el / Articles	
•	Etika Feminis Melawan Stigma Teokrasi-Patriarki: Refleksi Pemilihan Presiden 2014 / Feminist Ethics	
	against Stigma of Theocracy-Patriarchy: a Reflection of 2014 Presidential Election	175-182
	Rocky Gerung	
•	Stereotip Ibu Negara & Karir yang Disembunyikan: Kajian Peranan dan Persepsi Istri Capres-	
	Cawapres pada Pemilihan Presiden 2014 / Stereotype of State's Mother and the Hidden-Career: a Study	
	on the Roles and Perception of Wives of Presidents and Vice Presidents Candidates in the 2014 Election	183-189
	Gadis Arivia	
•	Status Perempuan dalam Dunia Kontemporer Politik Islam: Tafsir Al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah	
	dan Al Adalah / Women's Status in Contemporary Islamic Politics: Tafsir of Al Hurriyah, Al Musawah, Al	
	Karamah and Al Adalah	191-196
	Husein Muhammad	
•	Genealogi Politik Islam Fatayat di Era Soekarno dan Soeharto: Kajian Feminisme Sejarah Organisasi	
	/ Genealogy of Islamic Fatayat Politics in the Era of Soekarno and Soeharto: a Feminist Studies on	407.005
	- J , ,	197-205
	Nihayatul Wafiroh	
•	Saudari-Saudari Yang Hilang dalam Ruang Publik: Kajian Sosio-Teologis Kristen terhadap Peran	
	Politik Perempuan / The Lost-Sisters in the Public Sphere: a Study of Socio-Theological Christianity on the Roles of Women's Politics	207-219
	Ira D. Mangililo	207-219
	Prasangka Budaya atas Tubuh dalam Perda-Perda Diskriminatif: Politisasi Agama atas Perempuan /	
•	Cultural Prejudice against Female's Bodies in Discriminative Local Regulations: Politicization of Religion	
	, .	221-226
	Indraswari	22. 220
	Peran Politik Perempuan dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 / Political Roles of	
		227-232
	Anita Dhewy	
	Agama, Pemilu 2014 dan Status Perempuan sebagai Liyan / Religion, 2014 General Election and Status	
	of Women as Other	233-240
	Dewi Candraningrum	
Wawa	ancara / Interview	
	Joko Widodo: "Tidak Boleh Ada yang Menghalangi Perempuan" / Joko Widodo: "No One Shall Block	
	Women's Political Participation!"	241-243
	Dewi Candraningrum	
Kata	dan Makna / Words and Meanings	245-246
	I / Profile	
•	Feminis Muslim Lies Marcoes-Natsir: "Perlunya Nilai Bersama dalam Menghadapi Fundamentalisme	
	Agama" / Lies Marcoes-Natsir: "We Need Communal Values to Speak Against Religious	
	Fundamentalism"	247-251
	Mariana Amiruddin	
Rese	nsi Buku/ Book Review	
•	Peran Politik Perempuan dalam Gerakan Fundamentalisme / Political Roles of Women against	
	Fundamentalism	253-256
	Anita Dhewy	

"Status Perempuan dalam Politik"

sia adalah rumah bagi 60 persen lebih penganut agama-agama mayoritas sekarang seperti Hindu, Budha, Kristen, Katolik, Islam, dan banyak aliran kepercayaan dan keyakinan lainnya. Dan Indonesia adalah rumah dari penduduk Muslim terbesar di dunia. Asia tenggara khususnya memiliki karakter yang kuat sekali dalam perbedaan lanskap kebudayaan dengan konstelasi politik, ekonomi, demografi dan tradisi sosial yang sangat beragam. kebudayaan transversal bersinggungan dengan aliran agama seringkali mengawinkan kelompok-kelompok etno-relijius. Dan dalam hal ini, modernitas menyumbang kelahiran dari fundamentalisme agama dalam politik kenegaraan. Dan korban paling nestapa dari kelahirannya adalah perempuan dan para Liyan. Lanskap baru ini mempengaruhi dan memberikan konstribusi pada bagaimana perempuan menggunakan agensinya, menggunakan ruang untuk melakukan manuver dalam arena publik yang bersifat strategis dan politis. Prediksi bahwa sekularisme akan tetap bertahan dan berkuasa dalam pertumbuhan kehidupan negara dan politik di Asia Tenggara pada dekade terakhir dipatahkan oleh semakin besarnya pengaruh agama terhadap negara melalui partai politiknya, terutama Indonesia dan Malaysia. Agama tidak hanya merangsek dalam arena publik tetapi juga masuk dalam proses-proses dan pokok-pokok peristiwa politik dan kenegaraan. Lalu bagaimana implikasinya bagi kehidupan politik dan sosial? Banyak feminis ragu dan tak percaya karena yang memenangkan dan menguasai kursikursi politik dan parlemen adalah tafsir-tafsir agama yang misoginis dan tak ramah pada Liyan. Fragmentasi politik dan misoginisme baru bermunculan dalam wajah politik dunia. Bahkan institusi hegemonik seperti negara dan pasar telah diubah oleh agama umat tertentu dan kemudian banyak penganut agama lain sangat dirugikan karenanya. Matra gender diabaikan dan jadi tema

semena-mena dalam pertarungan politik, baik skala internasional, nasional dan lokal.

Meskipun Indonesia menjadi salah satu contoh terbaik praktek Islam moderat dan progresif, akan tetapi wajah-wajah tafsir yang tak ramah pada perempuan, minoritas seksual, etnis minoritas dan kelompok rentan lainnya masih mewarnai perjalanannya pada dekade terakhir. Tahun 1980an merupakan tahun kebangkitan bagi revivalisme Islam di Indonesia, kemudian berkembang dengan pesat setelah jatuhnya rejim otoriter Orde Baru, Soeharto di tahun 1998. Partai-partai politik berbasis Islam (seperti PPP, PKB, PAN, PKS, dan PBB) berdiri dan sampai sekarang kuat menancapkan pengaruhnya dalam sistem politik dan kenegaraan di Indonesia. Dan perolehan suara di Pemilu Legislatif 9 April kemarin mereka mengalami kenaikan suara seperti yang dikabarkan dalam rubrik RISET Jurnal Perempuan 82 kali ini. Dus, agama dan politik tetap tidak bisa dipisahkan dalam urusan kenegaraan. Tak hanya di pusat, sejak tahun 2001 Daerah Istimewa Aceh merupakan salah satu contoh ekstrem dimana perempuan kemudian banyak dikebiri hak-haknya melalui Qanun Syariah – berbeda jauh dari jaman Cut Nyak Dien dimana perempuan jauh lebih merdeka dan perkasa. Perempuan Aceh kini banyak sekali dibatasi dari cara berpakaian, berkendaraan, berada di ruang publik, sampai cara perempuan berswara dan tertawa pun juga diatur. Kecurigaan besar atas tafsir tak ramah gender yang masuk dalam diskursus politik ini bukan tanpa alasan.

Kerja keras perempuan dalam dua organisasi massa Islam terbesar Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah untuk menampilkan wajah Islam yang tidak misoginis terbengkalai dan dipukul mundur oleh wajah tafsir baru yang tak lagi ramah pada para Liyan. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah anggota legislatif jadi perempuan di parlemen 2014 ini, dimana perempuan hanya menempati sekitar 17% dari seluruh jumlah

kursi. Ini bukan kabar gembira. Status perempuan masihlah (l)iyan. Revivalisme Islam dalam politik, seperti dalam temuan Susan Blackburn dalam bukunya *Women and the State in Modern Indonesia* (Cambridge University Press, 2004) justru menambah beban terhadap perempuan dan memperlihatkan wajah diskriminatifnya yang kentara. Setiap kali didiskusikan agama dan politik, maka aspek stabilitas dan pertahanan merupakan pokok pertama

yang dibicarakan. Sedangkan nasib perempuan dan para (l)iyan seringkali diabaikan. Tugas dari kajian Jurnal Perempuan pada edisi kali ini adalah untuk menarasikan kajian analitik untuk mempertanyakan posisi agama dalam politik dan negara secara ontologis; serta memetakan konsekuensi dan implikasinya bagi kesetaraan gender dan keadilan bagi (l)iyan dalam narasi Pileg dan Pilpres tahun 2014 ini. (Dewi Candraningrum, Pemimpin Redaksi).

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014 Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Rocky Gerung. Departemen Filsafat, FIB, Universitas Indonesia. Kampus UI Depok Jawa Barat 16424, Telp. +62.21.7863528, +62.21.7863529, Faks. +62.21.7270038

Etika Feminis Melawan Stigma Teokrasi-Patriarki: Refleksi Pemilihan Presiden 2014

Feminist Ethics against Stigma of Theocracy-Patriarchy: a Reflection of 2014 Presidential Election

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 175-182, 4 daftar pustaka.

Feminist politics is a perpetual investment in a just civilization. It awares of the injustice structure that is inherently located within the sociological body of patriarchal system. It needs more than voluntary-echo in democracy rather a strong conceptual tools that will enlighten the dialectic transport of communication in democratic system. Any feminists shall be alert to watch and guard, as well as, cynically, radically, monitor the run of the new-elected president—whether he will bring mandate of equality or not. Short-term strategy has been invested to block the new-order regime to take control; and long-term strategy shall be invested to guarantee the system of equality in the new cabinet.

Keywords: ethics of feminism, women, theocracy-patriarchy, presidential election.

Politik feminis adalah investasi peradaban. Politik feminis telah lama mengetahui bahwa menjadi perempuan dan mengalami ketidakadilan adalah satu paket sosiologi yang diselenggarakan oleh sistem patriarki. Bahwa keperluan perubahan politik tidak saja memerlukan partisipasi lapangan, tapi terlebih ketajaman diskursus dalam membaca struktur ketidakadilan itu. Itulah sebabnya diperlukan terus-menerus pemahaman teoretik yang kuat agar euforia politik lapangan itu tidak menghanyutkan peralatan-peralatan konseptual feminis, yaitu peralatan pikiran dan keyakinan tentang keadilan yang lebih radikal. Politik feminis juga memahami bahwa upaya menyelenggarakan keadilan itu, pada momenmomen kritis seperti Pemilu, memerlukan "strategi jangka pendek" untuk secara minimal mencegah masuknya watak otoritarian dalam politik.

Kata kunci: etika feminis, perempuan, teokrasi-patriarki, pemilihan presiden

Gadis Arivia. Departemen Filsafat, FIB, Universitas Indonesia. Kampus UI Depok Jawa Barat 16424, Telp. +62.21.7863528, +62.21.7863529, Faks. +62.21.7270038

Stereotip Ibu Negara & Karir yang Disembunyikan: Kajian Peranan dan Persepsi Istri Capres-Cawapres pada Pemilihan Presiden 2014

Stereotype of State's Mother and the Hidden-Career: a Study on the Roles and Perception of Wives of Presidents and Vice Presidents Candidates in the 2014 Election

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 183-189, 16 daftar pustaka.

This paper investigates stereotype of first ladies and image being built during 2014 Indonesia presidential election. Wives of candidates in the election are highly accomplished as well as being graduated from universities, yet these facts are not exposed adequately in the media as part of public education on equality. Most of the time, they are being posited as faithful-partner and bold-supporter of their husbands/partners. Interviews held by the media frequently narrate the drama within the house, family, and their romance. Their career and professionalism are being hidden from the public. Platform

of empowerment and gender equality are highly cultivated, promoted, and campained by political-parties as well as NGOs, yet missed the wives to be involved. The capacity of the presidential candidate's wives on gender, equality and women's empowerment platforms designed by the political parties need to be promoted and scrutinized.

Keywords: first ladies, wife, career, presidential election.

Tulisan ini mengkaji stereotip ibu Negara dan *image* yang terbangun pada masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Para istri capres dan cawapres memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan cerdas serta berpengalaman, namun sayang sekali, perihal ini tidak digali media dan menjadi representasi untuk pendidikan publik. Kecerdasan mereka tidak diekspos dan tidak diberikan panggung. Mereka diposisikan sebagai pendamping setia suami dan pendukung pendapat suami mereka. Wawancara yang dilakukan media hanya seputar kegiatan rumah tangga atau drama kisah cinta mereka. Platform pemberdayaan perempuan tidak banyak berbunyi di kedua kubu karena penjelasan platform ini diambil alih oleh partai atau LSM perempuan yang telah memihak. Padahal penguasaan istri-istri capres dan cawapres dalam mendorong platform pemberdayaan perempuan yang disusun oleh tim kampanye penting untuk digali.

Kata Kunci: ibu negara, istri, karir, Pilpres.

Husein Muhammad. Komisioner Komnas Perempuan. JL. Latuharhary No.4B, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Jakarta 10310, Telp. (021) 3903963

Status Perempuan dalam Dunia Kontemporer Politik Islam: Tafsir *Al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah* dan *Al Adalah*

Women's Status in Contemporary Islamic Politics: Tafsir of Al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah and Al Adalah.

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 191-196, 6 daftar pustaka.

This paper examines theological sources of Islam on the status of women in Politics. Al Quran states that equality between men and women are guaranteed in politics such as in Quran: Ali Imran, 195; an Nahl, 97; at Taubah, 71. Islamic politics based on the following postulates: first, freedom (al Hurriyyah). Human beings are only serving God. Second, equality (Musawah, non-discriminatory). All human being are equal in front of Allah. Third, respect to other human beings (Karamah al Insan/ preserving the other human's dignity). Fourth, justice ('Adalah). Theological sources of Islam has given foundation for the contemporary status of women in politics which had long been stripped away due to misogynistic interpretation of Quran. Quran has ontologically supply equality and justice to human rights that can be used in politics and state affairs.

Keywords: Al Quran, al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah, Al Adalah, politics

Kajian ini membahas sumber-sumber teologi dalam Islam perihal status perempuan dalam politik. Alquran menegaskan adanya kesetaran antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan-pekerjaan politik tersebut (Q.S. Ali Imran, 195; an Nahl, 97; at Taubah, 71). Prinsip politik Islam berdasarkan beberapa postulat: pertama, kebebasan (al Hurriyyah). Manusia hanya menjadi hamba bagi Tuhan. Kedua, kesetaraan (Musawah/Equality dan non diskriminasi): semua manusia adalah sama dan setara di hadapan Allah. Ketiga, penghormatan manusia (Karamah al Insan/Dignity). Keempat, keadilan ('Adalah/Justice). Sumber-sumber teologi Islam memberikan landasan fundamental bagi seluruh aktivitas manusia dalam kehidupan bersamanya di muka bumi ini. Islam telah meletakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia tentang kesetaraan dalam politik dan kenegaraan.

Kata kunci: Al Quran, al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah, Al Adalah, politik.



Nihayatul Wafiroh. Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) Yogyakarta. Gadjah Mada Graduate School Building, III-IV Floor, Jl. Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta, Indonesia 55281. Telephone/Fax: +62-274-562570

Genealogi Politik Islam *Fatayat* di Era Soekarno dan Soeharto: Kajian Feminisme Sejarah Organisasi

Genealogy of Islamic Fatayat Politics in the Era of Soekarno and Soeharto: a Feminist Studies on Organizational History

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 197-205, 21 daftar pustaka.

Indonesian Muslim women had long been an inseparable part from political activities since the colonial period to present era. During colonial era, although they did not work formally under certain Islamic women's organizations, they made real contributions to the women's political movement in Indonesia since they formed women's branches of existing mass organizations. Fatayat, this organization is the sister branch of the largest Islamic organizations in Indonesia: Nahdlatul Ulama. This paper narrates that the involvement of Fatayat in politics had its historical and genealogical roots since Soekarno era. Sukarno facilitated Fatayat to develop power capacity in politics. However, during Soeharto era Fatayat experienced a setback due to New Order's control toward women's organization with its "ibuism" ideology. In order to maintain its existence, Fatayat decided to collaborate with government by incorporating state's program such as PKK, Posyandu into their activities while alos made network with national and international funding organization.

Keywords: politics, Fatayat, NU, Soekarno, Soeharto.

Perempuan Muslim Indonesia tidak dapat dipisahkan dari gerakan politik sejak era kolonial sampai dengan sekarang. Selama era colonial, organisasi perempuan Muslim merupakan cabang dari organisasi masa muslim. Fatayat adalah saudari bagi organisasi massa bernama Nadlatul Ulama. Mereka memberikan kontribusi besar dalam proses pemberdayaan perempuan. Tulisan ini menarasikan keterlibatan Fatayat dalam politik yang secara genealogis ada sejak jaman Soekarno. Soekarno memberikan kesempatan pada Fatayat untuk mengembangkan kapasitas politiknya. Akan tetapi, kemudian mengalami kemunduran pada era Soeharto. Soeharto mengontrol organisasi-organisasi perempuan melalui ideology "ibuisme" Negara. Fatayat kemudian memutuskan meleburkan diri dalam kebijakan pemerintah tersebut dengan terlibat dalam PKK, Posyandu, dll—meskipun juga menerima dan mengembangkan jaringan dengan dunia luar.

Kata kunci: politik, Fatayat, NU, Soekarno, Soeharto.

Ira D. Mangililo. Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana. Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga - Indonesia 50711, Telp 0298-321212

Saudari-Saudari yang Hilang dalam Ruang Publik: Kajian Sosio-Teologis Kristen terhadap Peran Politik Perempuan

The Lost-Sisters in the Public Sphere: a Study of Socio-Theological Christianity on the Roles of Women's Politics

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 207-219, 1 gambar, 1 tabel, 23 daftar pustaka.

The purpose of this paper is to understand the role of Indonesian Christian women in the public sphere, especially in the realm of politics. This article aims to reconstruct the role of Israelite women who lived in pre-monarchic Israel using sociological, social science, anthropological, and archeological methods. The result of my analysis shows that the demands of war that occurred continuously in the territory of ancient Israel and the opening of new land in the mountainous regions of Israel required the active participation of women to not only be involved in the reproduction but also the production—an activity that belonged to male members of the family. This phenomenon creates a balance in the division of labor between men

and women which of course increased the status of women in society. The result of this reconstruction that underlines the active role of women in the public sphere in the world of ancient Israel becomes an important model for Christian women in Indonesia today to take an active role in the public sphere, especially in politics.

Keywords: women, public sphere, politics, Christian theology.

Tujuan tulisan ini adalah untuk memahami peran perempuan Kristen Indonesia di ruang publik khususnya di bidang politik. Tulisan ini hendak merekonstruksi peranan perempuan yang hidup pada jaman pra-monarki Israel. Hasil analisa saya menunjukkan bahwa tuntutan peperangan yang terjadi terus-menerus di wilayah Israel kuno dan pembukaan lahan baru di wilayah-wilayah pegunungan Israel menuntut adanya peran aktif dari perempuan untuk tidak hanya terlibat di bidang reproduksi melainkan juga bidang produksi-suatu aktivitas yang biasanya menjadi tanggung jawab kaum laki-laki. Fenomena ini menciptakan keseimbangan di dalam pembagian kerja di antara laki-laki dan perempuan yang tentu saja meningkatkan status perempuan di dalam masyarakatnya. Hasil rekonstruksi yang menggarisbawahi peranan aktif perempuan di ranah publik di dunia Israel kuno ini akan menjadi model yang penting bagi para perempuan Kristen di Indonesia untuk turut berperan aktif di dalam ranah publik terutama di bidang politik.

Kata kunci: perempuan, ruang publik, politik, teologi Kristen.

Indraswari. Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Jalan Ciumbuleuit No.94, Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40141 . Telp. (022) 203 2655; (022) 204 2004, Faks. (022) 203 1110

Prasangka Budaya atas Tubuh dalam Perda-Perda Diskriminatif: Politisasi Agama atas Perempuan

Cultural Prejudice against Female's Bodies in Discriminative Local Regulations: Politicization of Religion and Women

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 221-226, 18 daftar pustaka.

This article discusses three main issues i.e. women, politics of identity and religion as well as the relationship among them. The three are binded by cultural prejudice casted upon female bodies, specifically in discriminatory by-laws in 342 regions in Indonesia. The discussion takes place within the framework of Indonesia's decentralization which has been marked with among other the implementation of public policies which targeting women's bodies and behavior in the name of morality and religion. The cultural notion is also discussed to provide a better understanding on the complexity of the relationship among the three issues as previously mentioned. This study shows that religion has been used and politicized to ostricised women's rights and other minorities' and vulnerable groups' rights.

Keywords: cultural prejudice, by-laws, religion, women.

Artikel ini membahas tiga isu utama yaitu perempuan, politik identitas dan agama serta relasi di antara ketiganya. Ketiganya diikat oleh prasangka budaya atas tubuh perempuan, terutama dalam 342 perda diskriminatif. Pembahasan dibingkai dalam konteks Indonesia di era desentralisasi yang ditandai dengan antara lain penerbitan berbagai kebijakan publik yang menyasar tubuh dan perilaku perempuan atas nama moralitas dan agama. Sisi budaya dibahas guna lebih memahami kompleksitas relasi tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa agama telah dipolitisasi untuk meminggirkan swara perempuan dan kelompok rentan lain.

Kata kunci: prasangka budaya, peraturan daerah, agama, perempuan.

Anita Dhewy. Redaksi Jurnal Perempuan. Jl. Lontar No. 12, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12960. Telp: 021-83702005, Faks: 021-83706747

Peran Politik Perempuan dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014

Political Roles of Women in the Legislative and Presidential **Election**

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 227-232, 7 daftar pustaka.

Female representation in parliament is decreasing in 2014, from 18 to 17 percent. This is not good news at all. It deteriorates further with no focus on women's status in each of presidential candidates. Status of women, sexual minorities, and other vulnerable groups were not becoming focus of issues in debates. Women's movement in near future and in the long run shall fight hard to tackle previous problems. This 2014 General Election has been a powerful tool as well for women to participate and to voice their concern regarding issues of equality and justice. This study unearths how women usher peaceful campaign during the parliament and presidential elections-showing their political engagement to Indonesia as democratic state.

Keywords: general election, parliament election, roles of women.

Representasi perempuan di parlemen menurun di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 ini, dari 18 persen di 2009 menjadi 17 persen di tahun ini. Sementara, status perempuan belum terlihat menonjol dalam konteks visi misi Capres dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, yaitu tidak menjadi materi dalam perdebatan. Ke depan gerakan perempuan perlu berjuang lebih panjang lagi. Terlepas dari tantangan tersebut, Pemilihan Umum (Pemilu) tetap menjadi alat partisipasi rakyat yang strategis dan bermakna. Hal ini memberikan ruang bagi rakyat untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Tak hanya itu, produk Pemilu yaitu parlemen dan presiden-wakil presiden juga relatif bisa dikritik. Kajian ini memaparkan bagaimana perempuan berusaha keras untuk mengawal pemilu damai, demikian juga memajukan swara dan partisipasinya secara politis.

Kata kunci: Pemilu, Pileg, Pilpres, peran perempuan.

Dewi Candraningrum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jalan A. Yani Tromol Pos 1, Pabelan Kartasura, Jawa Tengah 57102

Agama, Pemilu 2014 dan Status Perempuan sebagai Liyan Religion, 2014 General Election and Status of Women as Other

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, hal. 233-240, 8 gambar, 6 daftar pustaka.

This research explains the interaction of religion and politics during the Legislative Election of April 9 and the Presidential Election of July 9, 2014 in considering the status of women. Feminist approaches are often suspicious or cannot believe how the alliance of these two terms (religion and politics) can truly serve the mandate for gender justice and social justice. Explanation of the General Election data affirms the vulnerable status of women and other groups, both within the structure of political parties, proportion of MP's and in the executive development paradigm of the incoming President. The entire women's movement, paradigmatically and practically, needs to work together, shoulder to shoulder, in order to analyse, criticise and nurture these narratives of justice for an equal society in the coming 2014-2019 cabinet period.

Keywords: Election, women, politics, religion, cabinet.

Kajian ini menjelaskan interaksi antara agama dan politik selama Pemilu 9 April dan Pilpres 9 Juli 2014 dalam kaitannya dengan status perempuan. Pendekatan feminis masih mencurigai bagaimana aliansi antara agama dan politik sesungguhnya tak melayani mandat kesetaraan. Penjelasan dari data Pemilu 2014 mengafirmasi status rentan perempuan dan minoritas Liyan baik dalam struktur dan budaya partai politik, yaitu proporsi anggota legislative dan eksekutif. Seluruh gerakan perempuan, dalam fakta ini, perlu bergandengan tangan untuk bekerjasama untuk menulis ulang keadilan gender dalam masyarakat untuk perubahan pada periode kabinet 2014-2019.

Kata kunci: Pemilu, perempuan, politik, agama, kabinet.

Vol. 19 No. 3, Agustus 2014, 183-189

UDC: 305

Stereotip Ibu Negara & Karir yang Disembunyikan: Kajian Peranan dan Persepsi Istri Capres-Cawapres pada Pemilihan Presiden 2014

Stereotype of State's Mother and the Hidden-Career: a Study on the Roles and Perception of Wives of Presidents and Vice Presidents Candidates in the 2014 Election

Gadis Arivia

Departemen Filsafat, FIB, Universitas Indonesia Kampus UI Depok Jawa Barat 16424, Telp. +62.21.7863528, +62.21.7863529, Faks. +62.21.7270038 <u>gadis.arivia.e@gmail.com</u>

Naskah Diterima 3 Mei 2014. Direvisi 21 Juni 2014. Disetujui: 15 Juli 2014

Abstract

This paper investigates stereotype of first ladies and image being built during 2014 Indonesia presidential election. Wives of candidates in the election are highly accomplished as well as being graduated from universities, yet these facts are not exposed adequately in the media as part of public education on equality. Most of the time, they are being posited as faithful-partner and bold-supporter of their husbands/partners. Interviews held by the media frequently narrate the drama within the house, family, and their romance. Their career and professionalism are being hidden from the public. Platform of empowerment and gender equality are highly cultivated, promoted, and campained by political-parties as well as NGOs, yet missed the wives to be involved. The capacity of the presidential candidate's wives on gender, equality and women's empowerment platforms designed by the political parties need to be promoted and scrutinized.

Keywords: first ladies, wife, career, presidential election.

Abstrak

Tulisan ini mengkaji stereotip ibu Negara dan *image* yang terbangun pada masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Para istri capres dan cawapres memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan cerdas serta berpengalaman, namun sayang sekali, perihal ini tidak digali media dan menjadi representasi untuk pendidikan publik. Kecerdasan mereka tidak diekspos dan tidak diberikan panggung. Mereka diposisikan sebagai pendamping setia suami dan pendukung pendapat suami mereka. Wawancara yang dilakukan media hanya seputar kegiatan rumah tangga atau drama kisah cinta mereka. Platform pemberdayaan perempuan tidak banyak berbunyi di kedua kubu karena penjelasan platform ini diambil alih oleh partai atau LSM perempuan yang telah memihak. Padahal penguasaan istri-istri capres dan cawapres dalam mendorong platform pemberdayaan perempuan yang disusun oleh tim kampanye penting untuk digali.

Kata Kunci: ibu negara, istri, karir, Pilpres.

Pendahuluan

Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014 baru saja usai. Berbeda dari prediksi berbagai kalangan, pilpres bisa dikatakan berjalan dengan damai tanpa bentrokan berarti antar kubu. Demokrasi dengan demikian sukses diselenggarakan di tanah air dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Demokrasi secara umum didefinisikan sebagai "rule by the people" (rakyat menentukan), sejak abad ke-5 SM di zaman Yunani *demokratia*—merupakan ukuran politik modern. Definisi ini tentunya seringkali diperdebatkan karena demokrasi pada kenyataannya sangat kompleks. Sebab demokrasi yang bisanya diterjemahkan sebagai "mayoritas menentukan"

(Hardin, 1990: 185-203) tidak mengandaikan bahwa semua yang baik pasti akan direpresentasikan oleh kelompok mayoritas. Misalnya, demokrasi tidak menjamin orang yang kompeten diajukan sebagai calon atau dipilih oleh mayoritas, sebab penentuan calon presiden lebih ditentukan oleh berbagai kepentingan dan dinamika politik yang ada.

Jadi, apakah yang hendak dicapai oleh demokrasi? Intinya semua tipe demokrasi menginginkan adanya kesepakatan untuk hidup bersama yang ditentukan secara bersama. Bagaimanakah kehidupan bersama itu diputuskan? Apakah keputusan tersebut merupakan keputusan bersama yang ideal? (Amy Gutman, 1995:411). Kehendak bersama yang ideal ini

tentu banyak diperdebatkan oleh kelompok feminis. Siapakah yang menentukan yang ideal? Siapakah yang menentukan wacana dan aspirasi perempuan? Apakah gagasan perempuan itu sendiri? Ataukah peranan dan persepsi "istri" calon presiden? Penulis memberikan tanda kutip pada kata istri sebab kandidat capres Prabowo Subianto tidak jelas apakah berpisah atau bercerai dari Titiek Soeharto. Dalam perjalanan kampanye Prabowo-Hatta, Titik Soeharto dijadikan "istri" untuk mendampingi Prabowo Subianto. Tulisan esei ini akan mengelaborasi sosok istri capres dan dampaknya pada pilpres dan kesetaraan gender.

Upaya Merebut Wacana Perempuan

Sejak awal penentuan calon pilpres, LSM perempuan sibuk menggagas dan menggodok proposal tentang kesetaraan gender. Proposal tersebut tidak berdasarkan hasil urun rembuk LSM perempuan itu sendiri melainkan telah terkotakkotak dengan afiliasi pada kubu tertentu. Kekuatan partai politik tampaknya lebih kuat dibandingkan LSM perempuan sehingga gagasan dan program kesetaraan gender ditentukan di partai bersama LSM dan bukan digagas di LSM perempuan tanpa melibatkan partai untuk dijadikan parameter partai. Pada prosesnya, dapat ditebak bahwa LSM perempuan lebih sibuk mempromosikan gagasan dan program kubu tertentu dan bukan gagasan dan program yang dirancang oleh LSM perempuan itu sendiri.

Catatan saya di atas menjadi penting untuk direfleksikan. Mengapa LSM perempuan yang dikenal dengan independensinya bisa terjebak pada kubu partai? Ada beberapa alasan. LSM perempuan yang dikenal dekat dengan perjuangan Hak Asasi Manusia (HAM) sejak awal telah berpihak pada kubu tertentu karena menganggap adanya kecacatan HAM pada kubu tertentu. Sehingga proses penguatan wacana gender lebih didasarkan pada kepentingan politik dan bukan kepentingan perempuan. Rasionalitas yang berjalan adalah kekalahan kubu yang "tidak memiliki" catatan HAM merupakan kekalahan pada kelompok perempuan. Oleh sebab itu, kelompok perempuan di dalam diskusi internal lebih memfokuskan diri pada pembahasan platform partai politik dan membandingkannya.

Alasan LSM perempuan untuk memihak pada kubu yang tidak memiliki catatan HAM bisa dipahami. Namun, pemihakan ini telah dipersepsi sebagai ketidaknetralan LSM dan telah memposisikan organisasi pada afiliasi partai tertentu. Pemihakan pada partai tertentu akhirnya tidak dapat menjernihkan pola pikir LSM untuk kritis dan mengedepankan gagasan dan programprogramnya sendiri kepada capres. Situasi ini berjalan dengan cepat dan tanpa disadari. Namun, pertanyaan yang penting dari sikap LSM perempuan yang memihak pada partai tertentu adalah apakah dengan pemihakkan tersebut masyarakat umum dilayani secara optimal tentang pengetahuan gender dan kepentingan mengedepankan kesetaraan gender? Ataukah pesan LSM lebih bertumpu pada pemenangan capres tertentu?

Tidak dapat dipungkiri di negara yang baru saja belajar berdemokrasi dan dihadapi pada pilihan yang kontras, LSM maupun akademisi sulit untuk bersikap netral atau fokus pada gagasan-gagasan kritis. Pada akhirnya, pertempuran yang terjadi adalah bukan pertempuran gagasan melainkan pertempuran untuk memihak pada sosok tertentu. Hal ini sangat dirasakan di kalangan kelompok perempuan yang berusaha untuk jernih dalam mengedepankan antara gagasan-gagasan yang terbaik untuk kesetaraan gender dan pemihakan pada sosok (karena ketakutan akan sosok yang dinilai cacat dalam HAM dan pengalaman masa lalu).

Belajar dari pengalaman pemilu di Iran pada tahun 2009, kelompok perempuan di Iran pada waktu itu sangat aktif dan giat dalam memastikan platform dan gagasan tentang kesetaraan gender diakomodasi oleh capres. Gagasan-gagasan tersebut bukan saja sebatas wacana namun juga terejawantah dalam sikap, ucapan dan tindakan capres serta juga tidak kalah penting istri para capres. Susan Tahmasebi, aktifis perempuan di Tehran mengungkapkan di wawancara NPR (11 Juni 2009), bahwa persaingan capres antara Presiden Mahmoud Ahmadinejad dan Houssein Mousavi diwarnai oleh wacana gender yang kontras diantara keduanya. Zara Rahnavard, istri Houssein Mousavi bahkan aktif memperkenalkan suaminya dan berbicara di berbagai forum terbuka tentang pikiran-pikirannya. Zara adalah seorang intelektual dan Direktur sebuah Universitas. Zara sendiri tidak menggunakan nama belakang suaminya dan memilih tetap memakai namanya sendiri. Sosok Zara sebagai istri Houssein Mousavi sangat dominan di dalam kampanye karena pikiran dan gagasannya serta memberikan semangat pada perempuan Iran. Penampilan dan dominasi pidato Zara memberikan kesan yang sangat positif.

Zahra Rahnavard saat itu berumur 64 tahun,

mendobrak tradisi kampanye Iran yang biasanya menggunakan istri hanya sebatas "pelengkap," penuh senyuman dan tanpa ekspresi. Zara tak mau berdiam diri disamping sang suami, seringkali Zara justeru memberikan pidato-pidato dan mengkritik diskriminasi terhadap perempuan di Iran. Zara dan capres Houssein Mousavi digambarkan sebagai sosok yang setara. Ketika BBC menanyakan hubungan perkawinan mereka, Zara dengan enteng menjawab, "He's a good adviser to me and I am to him." Meskipun Houssein Mousavi tidak memenangkan pemilu di Iran, namun sosok Zara begitu membekas di mata perempuan Iran. Sosok istri capres bagi LSM perempuan menjadi penting untuk mengevaluasi kualitas dan tingkat pemikiran kesetaraan gender seorang capres. Tidak hanya itu, seorang capres yang memiliki pasangan yang sadar akan kesetaraan gender tentunya akan mau mendobrak tradisi yang mengekang perempuan serta mengawal kebijakankebijakan yang pro-gender.

Stereotip Istri Capres dan Cawapres

LSM perempuan di Indonesia pada pilpres ini harus diakui luput untuk mengelaborasi sosok istri (atau orang dekat) para capres. Kesibukan LSM perempuan untuk mengkampanyekan platform kesetaraan gender dari kubu yang dibelanya, tidak menyisakan waktu menggali sosok para istri capres dan cawapres. Akibatnya, wacana publik tergiring pada stereotip media mengenai istri capres yang ideal. Media mainstream dan media sosial membentuk wacana istri capres sesuai dengan setereotip mayoritas masyarakat. Paling tidak media dan media sosial memproyeksikan beberapa stereotip seorang istri/pendamping presiden yang dianggap pantas.

Pertama, Menjadi pelayan suami yang sempurna. Media dan sosial media berlomba-lomba menampilkan sosok istri capres yang ideal. Para penasehat politik dari kubu masing-masing berusaha menampilkan para istri/pendamping sebagai sosok yang taat dan setia pada suami. Baik Iriana Widodo maupun Titiek Suharto digambarkan sebagai sosok pendukung yang setia duduk manis menunggu saat acara perdebatan capres. Mereka pun diposisikan sebagai istri/pendamping yang setia berdiri di samping para capres ketika para capres berpidato. Media tidak mengulas panjang lebar latar belakang pendidikan dan karir para istri/pendamping sebab gambaran perempuan yang cerdas sebagai istri/ pendamping dianggap bukan sebagai keuntungan melainkan kerugian. Padahal kedua istri capres

berlatar pendidikan tinggi, sama-sama lulusan Sarjana Ekonomi dari universitas terkemuka. Media dan para penasehat partai lebih menginginkan menonjolkan pendamping suami yang melayani. Liputan6 misalnya mengisahkan tentang bagaimana Iriana pandai melayani suami dan senang memijit suami (27 Juli 2014). Demikian pula di twitter Titiek dipenuhi pertanyaan tentang masakan apa yang disukai Prabowo saat berbuka puasa dan saur. Tidak ketinggalan para istri calon wapres dikisahkan oleh media sangat setia mengurus suami. Mufidah Kalla mengungkapkan peranan ibu negara yang terpenting adalah pendukung utama aktifitas suami sebagai presiden termasuk urusan pakaian, makanan dan hobi seorang kepala negara (Tribunnews, 19 Juni 2014).

Kedua, Menarasi Suami. Para istri/pendamping capres dijadikan orang yang mengisahkan kehebatan suami mereka. Bila mungkin selalu menonjolkan kelebihan suami dan tidak pernah mencelanya. Michelle Obama (Istri Presiden Barack Obama) pernah memberikan wawancara kepada Tonya Lewis Lee di Glamour Magazine tentang suaminya yang malas mengambil kaus kakinya sendiri dan ditinggalkannya begitu saja di lantai rumah. Kritik kaus kaki bau yang dipakai suaminya menjadi berita besar, sebab Michelle dikesankan enggan melayani mengambil kaus kaki suaminya (ABC, 8 Januari 2009). Para istri/pendamping capres di dalam politik bertindak sebagai public relations suami mereka dalam skala ruang privat. Apa yang terjadi di rumah harus menggambarkan suami yang sempurna sesempurna di ruang publik.

Narasi tentang suami adalah fokus utama para istri/pendamping capres dan cawapres. wawancara difokuskan pada keberhasilan para suami. Meski media selalu menguatkan pandangan umum "di balik pria sukses ada wanita hebat", namun pandangan ini dimaksudkan untuk menggarisbawahi kesuksesan suami dan agar suami sukses maka istri harus melayani. Wawancara Sindonews pada tanggal 20 Mei 2014, mengungkapkan dukungan Okke Rajasa yang tidak pernah surut mendukung karir Hatta Rajasa hingga menjadi orang hebat. Tidak satu pun kalimat yang mengulas tentang pengalaman karir Okke Rajasa sendiri yang sempat menjadi dokter gigi. Demikian halnya ketika Ainun Habibie menjadi istri Presiden Habibie, pengalaman karir Ainun sebagai dokter ditonjolkan justeru setelah beliau meninggal.

Satu-satunya ibu negara di Indonesia yang justru gigih menarasikan hal di luar suaminya adalah Sinta Nuriyah Wahid. Sinta Nuriyah Wahid memiliki peranan yang besar dalam membentuk narasi di luar "kesempurnaan" suaminya. Ia justeru berusaha menciptakan narasinya sendiri, tentang peranannya dalam memperjuangkan kesetaraan perempuan dan bahkan tidak segan turun berdemonstrasi menentang Rancangan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi.

Ketiga, Penekanan pada peranan istri yang pasif. Dalam acara "Perempuan dibalik sang Pemimpin", Iriana Widodo diwawancarai Fifi Aleyda Yahya pada tanggal 24 Juni 2014 di acara Metro TV. Metro TV mengambil setting keluarga yang sedang makan bersama. Iriana didampingi dua anaknya dan Joko Widodo. Ada paling tidak 10 pertanyaan yang diajukan wartawan Metro TV kepada Iriana Widodo. Beberapa pertanyaan tersebut berusaha menggali pemikiran Iriana dan pendapatnya tentang keluarga maupun perasaannya terhadap pekerjaan suaminya. Sayang sekali wawancara tersebut akhirnya lebih banyak diambil alih oleh Jokowi. Iriana tampak lebih banyak memandang suaminya dan mengandalkan jawaban suaminya. Tibalah pada pertanyaan yang sangat menarik soal surat nikah mereka yang tertera keterangan "tidak mau dimadu." Fifi menanyakan kepada Iriana mengapa ada keterangan tersebut dan siapa yang membubuhkannya? Bagi saya ini pertanyaan yang dapat menggali pendapat Iriana tentang kesetaraan gender. Namun sayang sekali, lagi-lagi Jokowi lebih banyak melontarkan pendapatnya dan tidak memberikan kesempatan untuk istrinya berpendapat. Sepanjang wawancara Iriana banyak tersenyum dan tertawa renyah. Keharmoniasan pasangan Iriana dan Jokowi memang banyak diangkat media.

Di lain pihak, Titiek Soeharto "pasangan" Prabowo Subianto lebih banyak memberikan wawancara kepada media soal pandangan-pandangannya tentang kehidupan berbangsa. Titiek memang baru saja terpilih menjadi anggota legislatif dari partai Golkar. Wawancara yang dilakukan media Politik Indonesia pada tanggal 7 Mei 2014 menjelaskan pandangan politiknya dan apa yang hendak ia perjuangkan di DPR seperti kesejahteraan yang merata serta kehidupan petani yang lebih baik. Hal yang menarik dari pernyataan-pernyataan Titiek Suharto adalah kedekatannya dengan Prabowo, namun ketika media mencecarnya tentang peranannya sebagai ibu negara nanti, Titiek menampik isu tersebut (Liputan 6, 9 Juli 2014). Titiek Suharto pun aktif berpidato di berbagai kesempatan kampanye Prabowo di Bali dan di Jakarta.

Pidato-pidato Titiek memang tidak panjang dan kurang banyak menggambarkan isi pemikirannya, akan tetapi terlihat cukup terlatih berbicara di depan umum. Demikian pula halnya dengan kedua istri cawapres, Okke Rajasa dan Mufidah Kalla, mereka lebih banyak tampil dan berbicara di depan umum. Mufidah Kalla bahkan beberapa kali mengingatkan istri pejabat soal korupsi.

Karir Yang Dihilangkan

Keempat, Pekerjaan sosial dan bukan karir. Apakah pekerjaan seorang ibu negara? Di Indonesia dan negara lainnya, pekerjaan ibu negara banyak dititikberatkan pada pekerjaan sosial. Berbagai pekerjaan sosial ditangani oleh ibu negara karena jabatan suaminya. Namun ada pula ibu negara yang bukan sekedar memilih pekerjaan sosial karena jabatan suaminya akan tetapi karena sungguhsungguh tertarik pada bidang tersebut. Pekerjaan sosial yang semacam itu disebut sebagai pekerjaan sosial yang substantif karena bukan hanya sekedar seremonial. Pekerjaan sosial yang substantif hanya berkonsentrasi pada bidang tertentu yang diminati Ibu Negara dan tidak menangani sebanyak mungkin program yang fungsinya sebatas pengguntingan pita. Misalnya Nancy Reagan, istri mantan Presiden Ronald Reagan dikenal dengan program sosialnya "Say No to Drugs" dan Barbra Bush dikenal dengan program bimbingan membaca untuk orang dewasa. Michele Obama dikenal dengan program menurunkan berat badan untuk anak-anak miskin yang terserang obesitas serta gerakan menanam sayur-sayuran di pekarangan rumah.

Ani Yudoyono juga tertarik dengan lingkungan dan berkonsentrasi pada gerakan menanam pohon. Para istri capres dan cawapres di media mengungkapkan segudang pekerjaan sosial mereka. Iriana Widodo aktif sebagai pemimpin ibu-ibu di organisasi PKK di Solo dan di DKI Jakarta yang menangani masalah kesehatan dan kemiskinan serta anggota kehormatan Rotary Club. Sedangkan berita Mufidah Kalla sangat banyak tentang acara kegiatan-kegiatan sosial yang dihadirinya dan dibinanya. Okke Rajasa menaruh perhatian pada tenun Indonesia, ia adalah ketua Cita Tenun Indonesia (CTI). Kegiatan Okke Rajasa di bidang ini (SWA, 3 Juni 2013) digambarkan sebagai kegiatan yang serius karena ia secara rutin terjun langsung ke pedalaman selama berhari-hari. Program pembinaan tenun CTI tersebar di 8 wilayah Indonesia seperti Bali, Sumatera Selatan, Banten, Sulawesi Tenggara, Garut&Majalaya, Sambas, Lombok dan Sumba (Nusa Tenggara Timur). Titiek Soeharto dikabarkan aktif di sejumlah organisasi sosial seperti Persit Candrakirana (organisasi para istri parajurit), ketua YSRI (Yayasan Seni Rupa Indonesia), Pembina Supersemar, Pembina Yayasan Purna Bhakti Pertiwi dan pengurus DPP Golkar sebagai ketua Tani dan Nelayan.

Memiliki karir saat menjadi ibu negara memang "tidak didukung" oleh masyarakat bukan saja di Indonesia tapi juga di negara-negara lain. Kebanyakan ibu negara terpaksa berhenti bekerja seperti Michelle Obama dan Hilary Clinton yang keduanya dikenal dengan profesi mereka sebagai pengacara sebelum menjadi ibu negara. Satu-satunya ibu negara yang tetap bekerja dan sampai saat ini dijadikan inspirasi oleh dunia adalah Eleanor Roosevelt (1884-1962). Eleanor merupakan istri Presiden Franklin D. Roosevelt, presiden Amerika di tahun 1933. Eleanor tidak mengiginkan menjadi ibu negara yang pasif dan tetap ingin bekerja serta memiliki kantor sendiri. Eleanor bekerja untuk Hak Azasi Manusia dan hakhak perempuan serta memiliki kolom tersendiri di sebuah koran. Eleanor selalu menggambarkan dirinya bekerja dalam bidang publik dan bukan sebagai ibu negara. Sikapnya diserang berbagai kritik dari masyarakat dan dianggap perempuan yang terlalu sibuk bekerja di luar rumah (Eleanor Roosevelt, biography.com). Kehidupan setelah masa jabatan suaminya usai, Eleanor menjadi diplomat PBB. Beberapa ibu negara memang kembali aktif meneruskan karirnya seperti Hilarry Clinton yang menjadi senator dan Menteri Luar Negeri setelah masa jabatan suaminya selesai.

Kelima, Baju dan Agama. Masalah baju menjadi masalah besar bukan hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara barat. Istri-istri capres dan cawapres pada saat kampanye terus diawasi, dikritik, dihujat atau disanjung bukan karena pikiran mereka melainkan karena baju dan perhiasan mereka. Publik sangat senang menghakimi istri-istri capres dan cawapres serta ibu negara. Beberapa ibu negara berhasil mengubah persepsi publik yang konservatif seperti Jackie Kennedy yang gemar memakai sleeveless (baju tanpa lengan) juga Michelle Obama. Carla Bruni, istri mantan presiden Perancis, Nicolas Sarkozy, menjadi tokoh yang sensasional dalam berpakaian. Bukan saja Carla mengenakan pakaian-pakaian yang menuruti seleranya sendiri, ia juga masih terus menyanyi dan mengeluarkan album Comme si de rien n'etait di tahun 2008. Publik Perancis akhirnya menerima cara berpakaian Carla dan bahkan sering

dijadikan ikon.

Di Indonesia pakaian perempuan menjadi hal yang sangat sensitif bukan saja untuk istri-istri capres dan cawapres akan tetapi juga untuk perempuan pada umumnya. Cara berpakaian di Indonesia seringkali diasosiasikan dengan "akhlak" atau moral seseorang. Semakin berlapis-lapis pakaian perempuan semakin dikatakan bermoral sedangkan semakin tipis pakaian perempuan semakin dihakimi tidak bermoral atau tidak pantas. Baju dengan demikian oleh mayoritas publik menjadi bagian dari agama. Meski Indonesia adalah negara sekuler, cara pandang Islam mendominasi sehingga jilbab menjadi cara berpakaian favorit mayoritas. Namun, cara berpakaian berjilbab sebenarnya baru beberapa pemilu belakangan. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, cara berpakaian khas Indonesia yakni kebaya merupakan cara yang direstui publik. Ibuibu pejabat pada masa tersebut memakai kebaya warna warni serta rambut yang disanggul. Pilpres tahun 2014 memperlihatkan pemaksaan kehendak mayoritas atas baju yang dipakai para istri capres dan cawapres. Dari keempat perempuan sebagai istri/ pendamping capres dan cawapres, dua diantaranya secra konsisten memakai jilbab. Iriana pada awal masa kampanye tidak mengenakan jilbab namun belakangan pada tahap terakhir kampanye terlihat konsisten memakai jilbab sedangkan Titiek kadang kala memakai kerudung. Iriana memiliki aura kecantikan yang kuat dan tampilan bercahaya saat tidak memakai jilbab. Namun, tekanan publik begitu luar biasa dan karena situasi politik, Iriana mengubah gaya busananya dengan mengenakan jilbab. Ketika Joko Widodo-Jusuf Kalla terpilih menjadi presiden dan wakil presiden ke-7, Iriana melepaskan jilbabnya. Media mengkritik tampilan Iriana yang melepaskan jilbabnya. JPNN news tanggal 27 Juli 2014 memberi judul berita "Iriana Widodo Diidentikkan Marshanda yang Melepas Jilbabnya". Hujatan publik begitu derasnya dan Iriana dituduh hanya mengenakan jilbab karena ingin suaminya menjadi presiden.

Penutup: Catatan Kritis

Pilpres 2014 diwarnai oleh nuansa agama yang kental. Saling fitnah dan tuduh tentang siapa yang lebih beragama dan siapa yang tidak, begitu mendominasi wacana publik. Para istri capres dan cawapres dituntut untuk berjilbab dan para capres dan cawapres diminta untuk berlomba mengaji. Saling melemparkan black campaign membuat geram Mufidah Kalla dan bahkan melontarkan pernyataan

agar kedua calon menguji kapasitasnya dengan beradu mengaji (Jawa Pos, 28 Mei 2014). Sangat disayangkan para istri capres dan cawapres selama pilpres 2014 begitu disibukkan oleh image menjadi pasangan yang paling Islami sehingga kapasitas mereka sendiri yang sesungguhnya luar biasa tidak diekspos oleh media. Para istri capres dan cawapres memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan cerdas serta berpengalaman di bidang publik. Akan tetapi kecerdasan mereka tidak diekspos dan tidak diberikan panggung agar mereka dapat berekspresi di depan publik. Mereka diposisikan sebagai pendamping setia suami dan pendukung pendapat suami mereka. Wawancara yang dilakukan media hanya seputar kegiatan rumah tangga mereka atau drama kisah cinta mereka. Misalnya Titiek terus disorot tentang bagaimana rona wajahnya ketika bertemu Prabowo dan apakah dia tersipu atau tidak. Padahal Titiek terpilih sebagai anggota parlemen dan tentunya bisa lebih banyak diwawancarai tentang pandangan politiknya. Demikian pula Iriana yang telah memimpin dengan sukses organisasi PKK seharusnya diberikan panggung untuk berbicara mengenai visi dan misi platform pemberdayaan perempuan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Platform pemberdayaan perempuan tidak banyak berbunyi di kedua kubu karena penjelasan platform ini diambil alih oleh partai atau LSM perempuan yang telah memihak. Padahal penguasaan istri-istri capres dan cawapres dalam mendorong platform pemberdayaan perempuan yang disusun oleh tim kampanye mereka penting untuk disuarakan sehingga perempuan tidak memilih berdasarkan "gossip", drama atau baju yang dikenakan istri-istri capres dan cawapres akan tetapi berdasarkan substansi platform pemberdayaan perempuan yang ditawarkan.

Para capres dan cawapres pun ikut bertanggung jawab dalam mendorong wacana kesetaraan gender di publik dengan memperkenalkan istri mereka secara egaliter dan memberikan penghormatan pada pekerjaan mereka di luar rumah. Pernyataan capres dan cawapres tentang pikiran dan karir istri mereka sangat minim dan kesempatan untuk memberikan pidato politik disamping capres dan cawapres hampir tidak ada. Meski istri para capres dan cawapres sangat cerdas dan mampu, namun seluruh penampilan mereka dikemas menjadi sangat pasif dan didasarkan pada norma agama yang dianut mayoritas. Agama dan norma agama telah memainkan peranan yang besar dalam membentuk penampilan dan representasi istri capres dan

cawapres. Apa yang pantas dan tidak pantas di publik divalidasi dan dikontrol berdasarkan norma agama. Agama dan norma agama menurut Dr. Azza Karam, penasehat UNFPA berbeda, sebagai berikut:

Religion and religious norms are not one and the same thing. Religion itself is a reference to a complicated set of institutions, texts (most considered holy, together with a body of interpretations thereof), as well as norms and values which are difficult to quantify, and almost impossible to group into one term. Moreover, religion also incorporates a range of spokespoersons-some whom are clergy and many of whom are, or can, be scholars, laymen and women, as well as, sometimes, political actors themselves. (Karam, A, Expert Opinion, 2009).

Pernyataan Karam menarik sebab ia membedakan antara agama dan norma agama, yakni norma agama lebih spesifik, lebih membentuk dan mengontrol tingkah laku. Belajar dari proses pilpres 2014, para istri capres dan cawapres juga capres dan cawapres jelas dikontrol oleh norma agama yang diprepresentasikan oleh tokoh-tokoh agama. Dampak yang besar dialami oleh para istri capres dan cawapres yang harus memodifikasi pakaian, ucapan dan tingkah laku mereka. Meski pakaian, ucapan dan tingkah laku yang dipaksakan oleh norma agama juga terjadi pada capres dan cawapres, akan tetapi penghakiman pada penampilan mereka tidak sekejam yang dialami istri para capres dan cawapres, khususnya pada Iriana.

Norma agama tampaknya telah mengalahkan norma tradisi dan budaya Indonesia pada pilpres 2014. Bila pada pilpres sebelumnya para istri capres dan cawapres mampu untuk menolak norma agama yang mengekang dengan menampilkan budaya dan tradisi Indonesia seperti kebaya dan ucapan salam berbahasa Indonesia dan bukan Arab. Kini, istri maupun capres dan cawapres justru berlomba mengikuti keinginan mayoritas. Keunikan dan keontetikan para istri dan juga capres dan cawapres hilang dalam hirukpikuk norma agama yang direstui. Pilpres 2014 telah usai. Mayoritas telah berbicara. Kini saatnya para istri dan presiden serta wakil presiden terpilih untuk kembali merebut jati diri mereka kembali. Pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan hendaklah mementingkan keadilan dan kesetaraan bukan semata-mata keinginan absolut mayoritas. Khususnya untuk Iriana Widodo dan Mufidah Kalla, tentu kami berharap suara anda akan lantang kembali memperjuangkan keadilan gender bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar kaum perempuannya masih berada di garis kemiskinan, kebodohan dan tingkat angka kematian ibu yang tinggi.

Daftar Pustaka

- Amy Gutman. 1995. *Democracy*, A Companion to Contemporary Political Philosophy, ed. Robert E Goodin dan Philip Pettit, Blackwell Publishing.
- ABC News, Michelle Obama Dishes Hubby, 8 January 2009.
- BBC News, Profile: Zahra Rahnavard, 16 Juni 2009.
- Eleanor Roosevel, biography.com
- Hardin, R. 1990. Public Choice Versus Democracy, John W Chapman dan Alan Wertheimer, eds Majorities and Minorities, New York: New York Uiversity Press.
- JPNN.com, Iriana Widodo Diidentikkan Marshanda yang Melepas Jilbabnya, 27 Juli 2014.

- Jawa Pos, Mufidah Kalla Sarankan Jokowi-Prabowo Lomba Mengaji, 28 Mei 2014.
- Sindonews.com, Cerita Okke di Balik Sukses Hatta Rajasa, 20 Mei 2014.
- Liputan 6, Titiek Soeharto: Di Negara Lain Ada Pemimpin Tanpa First Lady, 9 Juli 2014.
- Liputan 6, Kala Jokowi dan Sang Istri Hobi Koleksi Barang Antik dan Burun. 27 Juli 2014.
- Metro TV, "Perempuan dibalik sang Pemimpin", Iriana Widodo diwawancarai Fifi Aleyda Yahya, 24 Juni 2014.
- Majalah SWA, Jerih Payah Okke Hatta Rajasa untuk Tenun Indonesia, 3 Juni 2013.
- titieksoeharto.com
- NPR (National Public Radio), Wives Play Bigger Role in Iran's Presidential Election, 11 Juni 2009.
- Politik Indonesia.com, Titiek Soeharto: Melanjutkan Perjuangan, Menuju Indonesia Tinggal Landas, 31 Juli 2014.
- Tribunnews,com, Wawancara Mufidah Jusuf Kalla tentang Peranan Penting Ibu Negara, 19 Juni 2014.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
 - Prof. Merlyna Lim
 - **Prof. Jeffrey Winters**
 - Dr. Kristi Poerwandari
 - Dr. Ida Ruwaida Noor
 - Dr. Arianti Ina Restiani
 - Dr. Phil. Ratna Noviani
- Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem peer review (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

- 1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinil, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
- 2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
- 3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (<u>redaksi@jurnalperempuan.com</u>).
- 4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: Judul komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. Nama ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. Abstrak ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. Pendahuluan bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. Metode Penelitian berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. Pembahasan disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. Penutup bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. Daftar Pustaka yang diacu harus tertera di akhir artikel.
- 5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*end-note*).
- 6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:

Arivia, Gadis. 2003. Filsafat Berperspektif Feminis. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational for PSWG en Indonesia.pdf

Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).

KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.

http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia

- 7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
- 8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
- 9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi <u>redaksi@jurnalperempuan.com</u> untuk mendapatkan petunjuk.



Vol. 19 No. 3, Agustus 2014

Catatan Jurnal Perempuan: Status Perempuan dalam Politik	iii-iv
• Etika Feminis Melawan Stigma Teokrasi-Patriarki: Refleksi Pemilihan Presiden 2014 / Feminist Ethics against Stigma of Theocracy-Patriarchy: a Reflection of 2014 Presidential Election	175-182
• Stereotip Ibu Negara & Karir yang Disembunyikan: Kajian Peranan dan Persepsi Istri Capres- Cawapres pada Pemilihan Presiden 2014 / Stereotype of State's Mother and the Hidden-Career: a Study on the Roles and Perception of Wives of Presidents and Vice Presidents Candidates in the 2014 Election Gadis Arivia	183-189
 Status Perempuan dalam Dunia Kontemporer Politik Islam: Tafsir Al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah dan Al Adalah / Women's Status in Contemporary Islamic Politics: Tafsir of Al Hurriyah, Al Musawah, Al Karamah and Al Adalah. 	191-196
 Husein Muhammad Genealogi Politik Islam Fatayat di Era Soekarno dan Soeharto: Kajian Feminisme Sejarah Organisasi / Genealogy of Islamic Fatayat Politics in the Era of Soekarno and Soeharto: a Feminist Studies on Organizational History 	197-205
 Nihayatul Wafiroh Saudari-Saudari Yang Hilang dalam Ruang Publik: Kajian Sosio-Teologis Kristen terhadap Peran Politik Perempuan / The Lost-Sisters in the Public Sphere: a Study of Socio-Theological Christianity on 	137 203
 Ira D. Mangililo Prasangka Budaya atas Tubuh dalam Perda-Perda Diskriminatif: Politisasi Agama atas Perempuan / 	207-219
Cultural Prejudice against Female's Bodies in Discriminative Local Regulations: Politicization of Religion and Women	221-226
 Peran Politik Perempuan dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 / Political Roles of Women in the Legislative and Presidential Election	227-232
of Women as Other Dewi Candraningrum Wawancara / Interview	233-240
Joko Widodo: "Tidak Boleh Ada yang Menghalangi Perempuan" / Joko Widodo: "No One Shall Block Women's Political Participation!" Dewi Candraningrum	241-243
Kata dan Makna / Words and Meanings Profil / Profile • Feminis Muslim Lies Marcoes-Natsir: "Perlunya Nilai Bersama dalam Menghadapi Fundamentalisme	245-246
Agama" / Lies Marcoes-Natsir: "We Need Communal Values to Speak Against Religious Fundamentalism" Mariana Amiruddin	247-251
Peran Politik Perempuan dalam Gerakan Fundamentalisme / Political Roles of Women against Fundamentalism	253-256





